

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN	
		2020	2021	2022
1.1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian			
	Pertumbuhan PDRB			
	Laju inflasi	1,21	1,21	1.5
	PDRB per kapita Berlaku	21.529.809,6		
	PDRB per kapita Konstan	16.256.901,6		
	Indeks Gini		0,377	0,277
	Pemerataan Pendapatan Bank Dunia			
	Indeks Ketimpangan Williamson (indeks ketimpangan Regional)			
	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan		6.84	6.64
	Rasio Kesenjangan Kemiskinan			
	Proporsi Penduduk dengan Pendapatan Kurang Dari USD 1,00 (PPP) per kapita per Hari			
	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,22	73.5	73.8
	Angka melek huruf	95,30		
	Angka usia harapan hidup	70,53		
	Persentase balita gizi buruk	0,02		
	Prevalensi balita gizi kurang	2.02		
	Cakupan desa Siaga Aktif			
	Angka partisipasi angkatan kerja	157,500	158,500	158,900
	Tingkat partisipasi angkatan kerja	72,36	70,48	70,98
	Tingkat pengangguran terbuka	4,46	4,39	4,08
	Rasio penduduk yang bekerja	95,54	95,61	95,92
	Laju Pertumbuhan PDB per Tenaga Kerja	Na	Na	Na
	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	0,60	0,60	0,65
	Proporsi Tenaga Kerja yang berusaha Sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja			
	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga sejahtera I			
	Indeks Kepuasan Masyarakat	84,31		
	Persentase PAD terhadap pendapatan	22,76	21,49	22,48
	Opini BPK	-		
	Pencapaian skor pola pangan harapan (PPH)			

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN	
		2020	2021	2022
	Penguatan cadangan pangan			
	Penanganan Daerah Rawan Pangan			
	Kontribusi Sektor Pertanian / Perkebunan terhadap PDRB			
	Kontribusi Sektor pertanian (Palawija) terhadap PDRB			
	Produksi Sektor Pertanian			
	Kontribusi Sektor Perkebunan(Tanaman Keras) Terhadap PDRB			
	Produksi sektor perkebunan			
	Kakao			
	Kelapa Sawit			
	Lada			
	Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB			
	Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB			
	Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB			
	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB			
	Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan Terhadap PDRB			
	Kontribusi Sektor Perdagangan PDRB terhadap PDRB			
	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB			
	Kontribusi Industri rumah Tangga terhadap PDRB sektor Industri			
	Pertumbuhan Industri			
	Kontribusi transmigrasi terhadap PDRB			
	ASPEK DAYA SAING DAERAH			
	Pengeluaran Komsumsi Rumah Tangga per kapita			
	Nilai Tukar Petani			
	Persentase Pengeluaran Komsumsi Non Pangan Per Kapita			
	Produktivitas Total daerah			
	Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap Total desa			
	Rasio Ekspor + Inpor Terhadap PDB (Indikator Keterbukaan )			
	Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan Di bank Umum			
	Rasio Pinjaman Terhadap Simpanan di BPR			



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN	
		2020	2021	2022
	angka kriminalitas yang Tertangani			
	rasio ketergantungan			
	ASPEK PELAYANAN UMUM			
	Layanan Urusan Wajib Dasar			
	Pendidikan			
	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			
	Angka Partisipasi Kasar	46,11		
	Angka Pendidikan yang ditamatkan			
	Angka Partisipasi Murni			
	Angka Partisipasi Murni (APM SD/MI/Paket A	92,54		
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTS/ Paket B	95,99		
	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C			
	Angka Partisipasi Sekolah	97,22		
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A			
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTS/Paket B			
	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMA/SMK/Paket C			
	Angka Putus Sekolah :			
	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,07		
	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,20		
	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA			
	AngkaKelulusan:			
	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,75		
	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,50		
	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA			
	Angka Melanjutkan (AM)			
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	95,76		
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTS ke SMA/SMK/MA			
	Fasilitas Pendidikan:			
	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	72,27		
	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	78,51		
	Sekolah Pendidikan SMP/MTS dan SMA/SMK/MA Kondisi bangunan baik	78,51		



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN	
		2020	2021	2022
	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	48,23		
	Rasio ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah Pendidikan Menengah			
	rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	399		
	Rasio Guru Terhadap Murid Pendidikan Menengah	498		
	Rasoi Guru/ murid perkelas rata-rata Sekolah Dasar	47,75		
	Rasio Guru Terhadap Murid Perkelas rata-rata			
	proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	92,99		
	angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun perempuan dan laki-laki	99,37		
	penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	210,109		
	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	1548		
	Kesehatan			
	Angka kematian bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	8,16	8,11	7,93
	angka kelangsungan hidup bayi	91,85		
	angka kematian balita per 1000 kelahiran hidup	0,72		
	angka kematian neonatal per 1000 kelahiran hidup	4,61		
	angka kematian ibu per 100,000 kelahiran hidup	108,74	126,17	108,14
	rasio posyandu per satuan balita	11,16		
	rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,33		
	rasio rumah sakit per satuan penduduk	0,007		
	rasio dokter per satuan penduduk	14,24		
	rasio tenaga medis per satuan penduduk	33,16		
	cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	35,88		
	cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	92,76		
	cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	88,98		
	cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan	100		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN	
		2020	2021	2022
	Proporsi penduduk dengan Asupan kalori dibawah Tingkat konsumsi Minimum (Standar yang digunakan Indonesia 2100 Kkal/ kapita/ hari)	Na		
	persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	96,85		
	non polio AFP rate per 100,000 penduduk	4,45		
	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	7,64		
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	100	100	100
	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	103,31		
	Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	0,00011		
	Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	67,09		
	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	97,74		
	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	100	100	100
	Penderita diare yang ditangani	99,79		
	Angka kejadian Malaria	0		
	Tingkat Kematian akibat malaria	0		
	Proporsi Anak Balita yang Tidur dengan kelambu Berinsektisida	0		
	Proporsi Anak Balita dengan Demam yang di obati dengan obat anti malaria yang tepat	0		
	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	0,0013		
	Penggunaan Kondom pada Hubungan Seks berisiko tinggi terakhir	Na	Na	Na
	Proporsi jumlah Penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki Pengetahuan Komprehensif tentang HIVS	0		
	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	0,19		
	Cakupan kunjungan bayi	88,52		
	Cakupan puskesmas	154,6		
	Cakupan pembantu puskesmas	57,48		
	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	88,34		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN	
		2020	2021	2022
	Cakupan pelayanan nifas	92,71		
	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	48,67		
	Cakupan pelayanan anak balita	66,39		
	Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak usia 6 - 24 bulan keluarga miskin	97,7		
	Cakupan penjangkauan kesehatan siswa SD dan setingkat	0		
	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	100	100	100
	Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS)	100	100	100
	Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	100	100	100
	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>			
	<b>Pekerjaan Umum</b>			
	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,400		
	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	0,062		
	Persentase Kawasan Pemukiman yang belum dapat dilalui kendaraan Roda 4			
	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	40,00		
	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	0,133		
	Persentase Sempadan jalan yang dipakai kaki lima atau bangunan rumah liar			
	Persentase rumah tinggal bersanitasi	97,91		
	Persentase sempadan sungai yang dipakai bangunan liar			
	Persentase drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat	84,64		
	Tidak terjadi genangan 2 kali setahun			
	Persentase Pembangunan Turap diwilayah Jalan penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor			
	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	50,72		
	Rasio Jaringan Irigasi	7,482		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN	
		2020	2021	2022
	Persentase penduduk berakses air minum	53,70		
	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	Na		
	Persentase areal kawasan kumuh perkotaan	0,04		
	Tersedianya Fasilitas Pengurangan Sampah diperkotaan			
	Rasio Tempat Pemakaman Kumuh per satuan Penduduk			
	Rasio Tempat Ibadah per satuan Penduduk			
	Penataan Ruang:			
	Rasio Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL / HGB			
	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah Kota / Kawasan Perkotaan			
	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	0,13		
	Ruang publik yang berubah peruntukannya			
	Rasio Luas Kawasan tertutup pepohonan berdasarkan Hasil Pemotretan citra satelit dan survai foto udara terhadap luas daratan			
	Ketaatan terhadap RTRW			
	<b>Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>			
	Rasio rumah layak huni	17,74		
	Rasio permukiman layak huni	75,74		
	Cakupan ketersediaan rumah layak huni	86,65		
	Cakupan layanan rumah layak huni yang terjangkau	58,12		
	Persentase pemukiman yang tertata	75,74		
	Persentase lingkungan pemukiman kumuh	0,04		
	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	2,24		
	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	13,35		
	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman yang didukung PSU	67,72		
	<b>Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>			
	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	9,12		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN	
		2020	2021	2022
	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,keindahan)	100	100	100
	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	22,89		
	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WМК)	91,18		
	Persentase Penegakan PERDA	84,61		
	<b>Sosial</b>			
	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	30,90		
	Persentase PMKS yang tertangani	26,39		
	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	28,32		
	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan social	100		
	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	70,00		
	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100
	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100	100	100
	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social	7,39		
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar			
	Tenaga Kerja			
	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	22,82	9,93	9,93
	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	8,82	13,33	13,33
	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	45,87	41,87	41,98
	Keselamatan dan Perlindungan	Kewenangan provinsi		
	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek	100	100	100
	Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah	0	0	0



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN	
		2020	2021	2022
	Besaran Pemeriksaan Perusahaan	Kewenangan provinsi		
	Besaran Pengujian Peralatan di Perusahaan	Kewenangan provinsi		
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	75,75	75,75	75,60
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	100	100	100
	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	100	100	100
	Rasio lulusan S1/S2/S3	483.81	488.81	498.76
	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>			
	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	76,02		
	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	6,67		
	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	23,98		
	Rasio KDRT	0,03		
	Persentase jumlah tenaga Kerja di bawah Umur			
	Partisipasi angkatan kerja perempuan	12,44		
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	100	100	100
	Cakupan perempuan dan anak Korban kekerasan yang mendapat layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di puskesmas mampu tatalaksana KTP / A dan TPT / PKT di rumah Sakit			
	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	100	100	100
	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasuskekerasan terhadap perempuan dan anak	94		
	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	94		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN	
		2020	2021	2022
	Cakupan Layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan			
	Rasio APM perempuan / laki-laki di SD	92,54		
	Rasio APM perempuan / laki-laki di SMP	95,99		
	Rasio APM perempuan / laki-laki di SMA			
	Rasio APM perempuan / laki-laki di Perguruan Tinggi			
	Rasio Melek Huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun	99,37		
	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sektor Non Pertanian			
	<b>Pangan</b>			
	Ketersediaan pangan utama	69,61	70	70
	Ketersediaan energi dan protein perkapita	3,258.86	2.463	2.463
	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	0	70	71
	<b>Pertanahan</b>			
	Persentase luas lahan bersertifikat	39,65		
	Penyelesaian kasus tanah Negara	100	100	100
	Penyelesaian izin lokasi	100	100	100
	<b>Lingkungan Hidup</b>			
	Tersusunnya RPPLH Kabupaten/Kota	0	1	1
	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kabupaten/kota	0	60	80
	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah provinsi	0	1	1
	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Air	89,19	27,00	27,50
	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Udara	98,40	29,50	29,55
	Hasil Pengukuran Indeks kualitas Tutupan Lahan	76,48	30,50	30,50
	Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH d yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	20	50	50

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN	
		2020	2021	2022
	Peningkatan kapasitas dan Sarana Prasarana Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di Daerah (PPLHD) di Kabupaten/Kota	0	1	1
	Terfasilitasi Pendampingan Pengakuan MHA	0	3	3
	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional 3			3
	Terverifikasi hak kearifan lokal atau hak pengetahuan tradisional	3	1	1
	Penetapan hak MHA	0	1	1
	Terfasilitasi kegiatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan	0	11	11
	Terfasilitasi penyediaan sarana/prasarana	0	1	1
	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan masyarakat	0	11	11
	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup	0	1	1
	Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota.		5	5
	Timbulan sampah yang ditangani	22,535,10	32,339	32,558
	Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R	5,34	25,68	26,33
	Persentase cakupan area pelayanan	0	0	0
	Persentase jumlah sampah yang tertangani	51,51	74,06	73,10
	Operasionalisasi TPA/TPST/SPA di kabupaten/kota	0	1	1
	Persentase izin pengelolaan sampah oleh swasta yang di terbitkan	0	0	0
	Persentase pengelolaan sampah oleh swasta yang taat terhadap peraturan perundang-undangan	0	0	0
	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>			
	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	1,00		
	Rasio bayi berakte kelahiran	0,96		
	Rasio pasangan berakte nikah	0,41		
	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi			



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN	
		2020	2021	2022
	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah		
	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	99,46		
	Cakupan penerbitan akta kelahiran	95,54		
	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>			
	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	100	100	100
	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	135	135	135
	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	365	365	365
	Persentase LSM Aktif	0	0,4%	0,4%
	Persentase LPM Berprestasi	2	10	10
	Persentase PKK aktif	139	140	140
	Persentase Posyandu aktif	273	274	274
	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	0	0	0
	Pemeliharaan paska program pemberdayaan masyarakat	-		
	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>			
	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	1,99		
	Total Fertility Rate (TFR)	2,21		
	Dokumen Rancangan Induk Pengendalian Penduduk dengan Lima Aspek			
	Persentase Sektor tersosialisasi konsep pembangunan berwawasan kependudukan dan alat ukurnya (IPBK/ Indeks pembangunan berwawasan kependudukan)			
	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	56,25		
	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	100	100	100
	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	1		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN	
		2020	2021	2022
	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	4		
	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	1		
	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,04		
	Angka Pemakaian Kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	72,47		
	Angka Kelahiran remaja (perempuan usia 15-19 ) per 1000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)			
	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang Istrinya di bawah 20 tahun	Tidak melaksanakan		
		Pendataan (pandemic covid 19)		
	Ratio Akseptor KB	72,47		
	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	72,47		
	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	15,61		
	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	24,98		
	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi 37,98			
	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	79,90		
	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	85,33		
	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	81,19		
	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	9,09		
	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	436.36		



Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN	
		2020	2021	2022
	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100		
	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	0,86		
	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100		
	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	113,76		
	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	100		
	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	Tidak melaksanakan pendataan (covid 19)		
	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)			
	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	71,13		
	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	21,77		
	Rata-rata usia kawin pertama wanita	19		
	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes	0,0058		
	<b>Perhubungan</b>			
	jumlah arus penumpang angkutan umum	-		
	Rasio ijin trayek	0,011		
	Jumlah uji kir angkutan umum	94,05		
	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	15		

**Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur**

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN	
		2020	2021	2022
	Persentase Layanan angkutan darat	0,183		
	Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	5,95		
	Pemasangan Rambu –rambu	100		
	Rasio panjang jalan perjumlah kendaraan	67,31		
	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum	290.241 org/253.796 barang		
	jumlah orang/barang melalui dermaga/bendara/terminal per tahun	253.796 org/ 139.023 barang		
	<b>Komunikasi dan Informatika</b>			
	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok Informasi Masyarakat di tingkat kecamatan			
	Cakupan layanan Telekomunikasi			
	Persentasi penduduk yang menggunakan HP/telpon	85,14		
	Proporsi rumah tangga dengan akses internet	53,44		
	proporsi rumah tangga yang memiliki komputer pribadi	85,14		
	<b>Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah</b>			
	Persentase Koperasi aktif	75,75	53,41	53,92
	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	100	94,56	94,86
	persentase BPR/LKM aktif	100	95,76	95,85
	Persentase Usaha Mikro dan kecil	95,28	95,71	99,18
	<b>Penanaman Modal</b>			
	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	26	30	35
	Jumlah nilai investasi berskala nasional PMDN	Rp. 1.636.201.132.539		
	Rasio Daya serap Tenaga Kerja	278,9		
	Kenaikan Penurunan Nilai realisasi PMDN( Milyar rupiah)	32,19		
	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>			
	Persentase organisasi Pemuda yang aktif		40,54	33,71
		39,33	44,94	50,56
			56,18	61,80
	persentase wirausaha muda		19	
	Cakupan pembinaan olahraga	0		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN	
		2020	2021	2022
	Cakupan pelatih yang bersertifikat	40		
	Cakupan pembinaan atlet muda	0		
	Jumlah atlet berprestasi	30	10	10
	Jumlah prestasi olahraga	4	5	7
	<b>Statistik</b>			
	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Ada	Ada	Ada
	Buku "Kabupaten dalam Angka"	Ada	Ada	Ada
	Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada
	<b>Persandian</b>			
	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	100	100	100
	<b>Kebudayaan</b>			
	Penyelenggaraan Festival seni dan budaya	0		
	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	15		
	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	47		
	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	3 unit		
	<b>Perpustakaan</b>			
	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	0,05		
	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	0,39		
	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	1,09		
	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	11,962		
	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	13,463		
	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang memiliki sertifikat	100		
	<b>Kearsipan</b>			
	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	87,18		
	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	4 kegiatan		
	<b>Layanan Urusan Pilihan</b>			
	<b>Pariwisata</b>			
	Kunjungan wisata	32,6	10	12
	Lama kunjungan wisata	3 hari		
	PAD sektor pariwisata	0,41		
	<b>Pertanian</b>			

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN	
		2020	2021	2022
	Kontribusi Sektor pertanian atau perkebunan terhadap PDRB			
	Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) terhadap PDRB			
	Kontribusi Sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB			
	Kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB			
	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	7,1		
	Cakupan bina kelompok petani	0,06		
	<b>Kehutanan</b>			
	Rehabilitasi Hutan dan lahan kritis			
	Kerusakan kawasan hutan			
	Rasio Luas kawasan Lindung untuk Menjaga Kelestarian Keanekaragaman Hayati terhadap total luas kawasan hutan			
	<b>Energi dan Sumber Daya Mineral</b>			
	Persentase rumah tangga pengguna listrik	98,91		
	Rasio Ketersediaan daya listrik			
	Persentase Pertambangan tanpa izin			
	<b>Perdagangan</b>			
	Ekspor Bersih Perdagangan	US\$ 773.511.973.67		
	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	29,02%		
	<b>Perindustrian</b>			
	Cakupan bina kelompok pengrajin	7,04%	5,56	6,08
	<b>Transmigrasi</b>			
	Persentase transmigrasi swakarsa	0		
	<b>Kelautan dan Perikanan</b>			
	Produksi perikanan	101%	100	100
	Konsumsi ikan	100%	100	100
	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	1.25 1.27 1,28 1.29 1.30	1.25	1,26
	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan territorial	0,23	0,23	0,23
	Nilai Tukar Nelayan	-	-	-
	<b>Penunjang Urusan</b>			

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN	
		2020	2021	2022
	<b>Perencanaan Pembangunan</b>			
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	-		
	Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	-		
	Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada		
	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	-		
	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	97,29%		
	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	93,34%		
	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW			
	<b>Keuangan</b>			
	Opini BPK terhadap laporan keuangan	-		
	Persentase SILPA			
	Persentase SILPA terhadap APBD			
	Persentase Program / kegiatan yang tidak terlaksana			
	Persentase Belanja Pendidikan (20%)	21,14%		
	Persentase Belanja Kesehatan (10%)	23,62%		
	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	56,28:43,72		
	Bagi hasil kabupaten/kota dan desa			
	Penetapan APBD	Tepat waktu (perda nomor 9 tahun 2020,tentang perubahan APBD Tanggal 19 Oktober 2020)		
	<b>Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan</b>			
	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan hari	4		

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022  
Kabupaten Luwu Timur

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA TAHUN	
		2020	2021	2022
	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	82,61%		
	Persentase ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan structural	88,07%		
	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	27 jabatan		
	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	787 jabatan		
	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	2572 jabatan		
	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>			
	Persentase inplementasi rencana kelitbangan			
	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Penerapan SIDA	16,67%		
	Persentase Perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.	23,8%		
	Persentase kebijakan Inovasi yang diterapkan di daerah			
	<b>Pengawasan</b>			
	Persentase tindak lanjut temuan	23,16%	88,00	90,00
	Persentase pelanggaran pegawai	0	0	0
	Jumlah temuan BPK	8	25	22
	<b>Sekretariat Dewan</b>			
	Tersedianya rencana kerja tahunan pada setiap alat-alat kelengkapan DPRD Kabupaten / Kota	1	1	1
	Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan fungsi pembentukan Perda, dan fungsi Anggaran dalam dokumen rencana lima tahunan (RPJM) maupun Dokumen rencana tahunan RKPD	17	14	13
	Terintegrasi program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi Pengawasan, pembentukan Perda dan Anggaran ke dalam Dokumen Perencanaan dan Dokumen Anggaran Setwan DPRD	7	7	7

Sumber: RPJMD Kab.Luwu Timur 2021-2026



**Tabel 3.1**  
Program Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Target capaian RPJMD Tahun 2022

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)	Kondisi Awal	Target Capaian Kinerja	Perangkat Daerah Penanggungjawab
			Tahun-2021	Tahun-2022	
1	Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh (M1)				
1 1	Meningkatkan kualitas hidup masyarakat (T1)	PDRB/kapita (Rp (juta))	78,58	71.45	
1 1 1	Meningkatnya kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat (S1)	Angka kemiskinan (Persen)	6,94	6.64	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Jumlah ketersediaan pangan utama setara pangan pokok (( Ton ))	246,1	205,774	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Jumlah lokasi gerakan diversifikasi pangan (lokasi)	6	6	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Jumlah lokasi yang rawan dan rentan pangan yang intervensi (lokasi)	0	3	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan (Persen)	0	100	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN
	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Pengembangan Objek Pariwisata (Persen)	100	100	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Kenaikan Jumlah Kunjungan Wisatawan (Persen)	123	95	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pembinaan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Persen)	58	95	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase stabilitasi dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok (%)	9	12	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP yang bertanda tera sah (%)	112,22	90	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Cakupan Bina Kelompok Pengrajin (%)	5.57	6.08	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Usaha Industri yang terdata dalam SIINAS (%)	100	100	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
			PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Penetapan Kawasan Transmigran (%)	100	100	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Luas Wilayah Transmigrasi yang di Bangun (Ha)	230	120	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase jumlah pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya (%)	95	95	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1	1	2	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia (S2)	Indeks Pembangunan Manusia (Persen)	73,24	73.8	
			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD (%)	49,02	46.91	DINAS PENDIDIKAN
				Angka Partisipasi Masyarakat putus/belum sekolah pada Lembaga Pendidikan non formal (%)	54,56	54.58	
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%)	99,81	103.33	
				Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%)	97,37	103.58	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Prevalensi gizi buruk (%)	0,02	0.02	DINAS KESEHATAN
				Angka kematian ibu (per 100000 KH)	126,17	108.14	
				Angka kematian Bayi (per 1000 KH)	8,11	7.93	
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (%) (%)	80	81.66	DINAS KESEHATAN
			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana pelayanan kefarmasian dan sarana produksi IRTP yang memenuhi ketentuan dan persyaratan perizinan (%)	50	70	DINAS KESEHATAN
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Jumlah desa/ kelurahan yang melaksanakan UKBM (Desa)	127	127	DINAS KESEHATAN
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan (%)	24	36	RSUD I LAGALIGO

]	]	]	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tingkat pemenuhan Pengembangan SDMK (%)	0	100	RSUD I LAGALIGO
]	]	]	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Prosentase PMKS yang diberikan bantuan sosial (%)	122	40.23	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
]	]	]	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Prosentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani (%) (%)	100	100	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
]	]	]	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Prosentase PMKS yang tertangani (%)	48,14	44.93	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
]	]	]	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Prosentase PMKS yang mendapat perlindungan dan jaminan sosial (%)	97,49	22.41	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
]	]	]	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Prosentase korban bencana yang ditangani (%)	100	100	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
]	]	]	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Prosentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara (unit) (%)	100	100	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
]	]	]	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Prosentase OPD yang memenuhi indikator 7 prasyarat PUG (%)	124	100	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
]	]	]	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu (%)	100	81.82	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
]	]	]	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Ratio layanan pembelajaran keluarga (%)	0,07	0.14	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
]	]	]	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Prosentase Ketersediaan Data dan Informasi Gender dan Anak di Tk. Kab/Kota (%)	100	100	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

]	]	]	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Prosentase indikator KLA yang terpenuhi (%)	100	100	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
]	]	]	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Prosentase anak korban kekerasan termasuk TPPO (%)	0	100	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
]	]	]	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Desa yang melibatkan masyarakatnya dalam membangun desa (%)	100	100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
]	]	]	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil ( parameter dan proyeksi penduduk ) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan (OPD) (Nilai)	4	4	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
]	]	]	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (modern contraceptive prevalence rate/mCPR) (persen)	65	66	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
]	]	]	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (Nilai)	35.02	35.52	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
]	]	]	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemenuhan Pengembangan Kapasitas daya saing Kepemudaan (Persen)	100	100	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
]	]	]	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase pemenuhan pengembangan kapasitas daya saing keolahragaaag (Persn)	100	100	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
]	]	]	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	persentase gugus depan yang aktif (persen)	95	95	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
]	]	]	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Pemustaka (%)	67,35	100	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
]	]	]	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Cakupan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur (%) (Persentase)	95	95	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

2	1	Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas(M2)			
2	2	2) Meningkatkan ketahanan ekonomi daerah secara merata (T2)	Rasio Gini (Persen)	0.38	0.28
2	2	3) Meningkatnya produktivitas sektor-sektor perekonomian daerah (S3)	Laju Pertumbuhan ekonomi (Persen)	6,42	2.50
		PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi yang terbit izin usaha simpan pinjam koperasi (%)	0	2.5
		PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang berkualitas (%)	29,41	41.25
		PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase koperasi yang dilakukan pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan koperasi (%)	31,88	53.25
		PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi yang meningkat manajemen pengelolaan melalui pendidikan dan pelatihan (%)	10	21.2
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase koperasi yang diberdayakan dan dilindungi (%)	0	2.15
		PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang menjadi wirausaha (%)	37,38	3.8
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase peningkatan skala usaha mikro (%)	3,68	1.83
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah Produksi Perikanan Nelayan Tangkap (Ton)	8.954,01	101,659.00
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan budidaya (Ton)	310.233	315,565.00
		PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku (Persen)	100	94
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah produksi hasil pengolahan perikanan (Ton)	312	322
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA	presentase dan sarana pertanian yang	100	100

PERTANIAN			dibangun (%)				
1	1	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Cakupan Layanan Penyediaan dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian (%)	100	100	DINAS PERTANIAN	
1	1	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	presentase pengendalian kesehatan hewan dan masyarakat veteriner (%)	100	100	DINAS PERTANIAN	
1	1	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	presentase pengendalian dan penanggulanagn bencana pertanian (%)	100	100	DINAS PERTANIAN	
1	1	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN				DINAS PERTANIAN	
1	1	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	presentase penyuluhan yang meningkat kapasitasnya (%)	84	100	DINAS PERTANIAN	
1	1	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pasar rakyat yang dimanfaatkan (%)	94,6	90	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
1	1	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Jumlah ekspor perdagangan (Ton)	76,000.00	78,000.00	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	
1	1	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Satuan Pemukiman Transmigran yang dikembangkan (Kawasan)	1	1	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	
2	2	4	Berkembangnya lapangan kerja dan lapangan usaha (S4)	Tingkat Pengangguran Terbuka (Persen)	4,96	3.3	
1	1	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Angka Partisipasi Angkatan Kerja (Orang)	154.100	158,900.00	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	
1	1	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (%)	73,89	75.75	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	
1	1	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) (%)	73,14	70.98	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	
1	1	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (%)	17,01	22.82	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	
1	1	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor PMA dan PMDN yang berskala Nasional (Angka)	41	40	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
1	1	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase rencana Investasi Penanaman Modal (%)	117,37	20	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	

1	1	1	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Pelaporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM) (%)	75	80	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3	1	1	Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas (M3)				
3	3	1	Meningkatkan kapasitas dan kualitas infrastruktur daerah (T3)	Indeks daya saing infrastruktur daerah (indeks)	0	0	
3	3	5	Meningkatnya daya guna dan hasil guna infrastruktur daerah (S5)	indeks kepuasan layanan infrastruktur (Predikat)	Memuaskan	Memuaskan	
1	1	1	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Rasio jaringan irigasi (%)	8,32	8.41	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	1	1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses terhadap Air Minum Melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi (%)	59.50	62.59	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	1	1	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	1	1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (%)	0	2	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	1	1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	1	1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	1	1	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	1	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase jalan kabupaten kondisi baik (%)	39,8	42.04	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	1	1	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Rasio tenaga teknis yang memiliki sertifikat kompetensi (%)	31.37	41.89	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1	1	1		Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan kerja (%)	100	100	

7	7	7	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase rata rata penyelenggaraan penataan ruang (%)	39,8	78	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7	7	7	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase rumah warga negara korban bencana atau terkena relokasi yang memperoleh rumah layak huni (%)	100	100	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
7	7	7		Persentase jumlah rumah yang dibangun oleh pengembang (%)	100	100	
7	7	7	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase kawasan pemukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (%)	24.94	43.88	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
7	7	7		Rasio rumah layak huni ( )	18.04	18.34	
7	7	7	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase RTLH diluar kawasan pemukiman kumuh yang ditangani (%)	2.81	2.89	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
7	7	7	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Cakupan lingkungan yang sehat dan aman di dukung dengan PSU (%)	21.05	42.1	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
7	7	7	PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	Persentase pengamanan tanah Kosong aset Pemda (%)	100	100	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
7	7	7	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase Angkutan Yang Layak (%)	0.72	0.73	DINAS PERHUBUNGAN
7	7	7		Persentase Sarana dan Prasarana Transportasi Yang disediakan (%)	41.8	64.88	
7	7	7	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase Kecelakaan Kapal angkutan di Danau dan sungai (%)	1.35	1.35	DINAS PERHUBUNGAN
7	7	7		Persentase Kecelakaan Kapal angkutan di laut (%)	0	0.07	
4	7	7	Menjaga ketahanan lingkungan hidup (T4)	Nilai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (Persen)	0	0	
4	4	6	Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup (S6)	Indeks kualitas lingkungan hidup daerah (Persen)	84,085	87.55	
7	7	7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA				DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
7	7	7	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase penyelesaian kasus tanah negara (%)	100	100	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

7	7	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase luas lahan yang dibebaskan (%)	100	100	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
7	7	PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase izin lokasi (%)	100	100	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
7	7	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Persentase luas lahan bersertifikat (%)	39.85	40.15	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
7	7	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase dokumen perencanaan lingkungan (Persen)	0	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7	7	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase perbaikan kualitas air, udara dan tutupan lahan (Persen)	1	1	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7	7	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH yang tertangani dengan baik (Persen)	100	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7	7	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase penghasil limbah B3 yang di awasi (Persen)	100	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7	7	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase usaha dan kegiatan yang taat pada regulasi standar lingkungan (Persen)	50	50	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7	7	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	Terverifikasinya MHA dan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional (Jumlah MHA)	3	3	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7	7	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase kelompok masyarakat yang dibina (Persen)	0	0	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7	7	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase penghargaan lingkungan yang diterima (Persen)	100	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7	7	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase masalah lingkungan yang di selesaikan (Persen)	50	50	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
7	7	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase jumlah sampah yang tertangani (Persen)	80	70	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
4	7	Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik(M4)				

4	5	1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani (T5)	Indeks reformasi birokrasi (IRB) (Persen)	46,94	0	
4	5	7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan (S7)	Nilai SAKIP Daerah (Peredikat)	WTP	WTP	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota (%)	95	95.3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	92	94	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PANGAN
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	DINAS KESEHATAN
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	95	95	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	DINAS LINGKUNGAN HIDUP
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota (%)	100	100	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	DINAS PENDIDIKAN
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

]	]	]	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
]	]	]	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota (%)	100	0	DINAS PERHUBUNGAN
]	]	]	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
]	]	]	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	DINAS PERTANIAN
]	]	]	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
]	]	]	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
]	]	]	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	95	95	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
]	]	]	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	INSPEKTORAT
]	]	]	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
]	]	]	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	RSUD I LAGALIGO
]	]	]	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	SEKRETARIAT DAERAH
]	]	]	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	SEKRETARIAT DPRD
]	]	]	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	ANGKONA
]	]	]	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	BURAU
]	]	]	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	KALAENA
]	]	]	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	MALILI

]	]	]	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	MANGKUTANA
]	]	]	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	NUHA
]	]	]	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	TOMONI
]	]	]	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	TOMONI TIMUR
]	]	]	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	WASUPONDA
]	]	]	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	WOTU
]	]	]	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	TOWUTI
]	]	]	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
]	]	]	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
]	]	]	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar (%)	100	100	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
]	]	]	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	persentase pelaksanaan kegiatan kebijakan perekonomian (%)	50	55	SEKRETARIAT DAERAH
]	]	]	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Rancangan perda Yang Difasilitasi (%)	80	83	SEKRETARIAT DPRD
]	]	]	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah (Persen)	96.5	96.7	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
]	]	]	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Perangkat Daerah yang Pengelolaan BMD tertata dengan baik (Perangkat Daerah)	100	90	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
]	]	]	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah (%)	97.2	97.5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Cakupan Peningkatan dan Pengembangan Aparatur (%) (Persentase)	115,75	90	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN				INSPEKTORAT
			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI				INSPEKTORAT
4	3	8	Meningkatnya kualitas pelayanan public (S8)	IKM Pelayanan SPM (Persen)	0	0	
				IKM Pelayanan perizinan dan non perizinan (Persen)	85,37	82.21	
			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan penerbitan Dokumen Kependudukan (persentase)	98,87	99.22	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Penerbitan Dokumen Pencatatan Sipil (persentase)	96,99	86.31	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (%)	65	75	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Program Pengelolaan Profil Kependudukan (%)	100	100	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa Yang baik penataan desanya (%)	100	100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa yang tertib administrasi (%)	100	100	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase informasi dan komunikasi publik pemerintah daerah yang dikelola (persen (%))	100	100	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	persentase pengelolaan aplikasi dan informatika pemerintahan daerah (persen (%))	100	100	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Capaian Kinerja program Pelayanan Penanaman Modal (%)	100	100	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Jumlah Database Penanaman Modal yang Valid (Angka)	2	1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

]	]	]	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data statistik dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah (persen (%))	100	100	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
]	]	]	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase persandian untuk pengamanan informasi pemerintahan daerah yang diselenggarakan (persen (%))	100	100	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
]	]	]	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Perangkat Daerah dan Desa yang menerapkan Tata Kelola Kearsipan sesuai dengan Peraturan yang berlaku (%)	100	100	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
]	]	]	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase arsip perangkat daerah yang terlindungi dan terselamatkan (%)	100	100	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
]	]	]	PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Presentase perijinan penggunaan arsip yang bersifat tertutup (%)	0	25	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
]	]	]	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Besaran Rekomendasi Izin Usaha Industri yang dihasilkan (%)	10	10	DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN
]	]	]	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase Cakupan Kegiatan Pemerintahan dan Kesejahteraan (%)	80	80	SEKRETARIAT DAERAH
]	]	]	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
]	]	]	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
]	]	]	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
]	]	]	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang terselenggara dengan baik (%)	100	100	ANGKONA
]	]	]	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran serta Masyarakat dalam Koordinasi,Fasilitasi,Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah (%)	100	100	ANGKONA

]	]	]	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan (%)	100	100	ANGKONA
]	]	]	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (%)	100	100	ANGKONA
]	]	]	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	BURAU
]	]	]	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah (%)	100	100	BURAU
]	]	]	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan (%)	100	100	BURAU
]	]	]	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (%)	100	100	BURAU
]	]	]	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang terselenggara dengan baik (%)	100	100	MALILI
]	]	]	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran serta Masyarakat dalam Koordinasi,Fasilitasi,Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah (%)	100	100	MALILI
]	]	]	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan (%)	100	100	MALILI
]	]	]	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (%)	100	100	MALILI
]	]	]	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	MANGKUTANA
]	]	]	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan	100	100	MANGKUTANA

			Daerah (%)				
]	]	]	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan (%)	100	100	MANGKUTANA
]	]	]	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (%)	100	100	MANGKUTANA
]	]	]	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	NUHA
]	]	]	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran serta Masyarakat dalam Koordinasi,Fasilitasi,Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah (%)	100	100	NUHA
]	]	]	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan (%)	100	100	NUHA
]	]	]	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (%)	100	100	NUHA
]	]	]	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang terselenggara dengan baik (%)	100	100	TOMONI
]	]	]	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah (%)	100	100	TOMONI
]	]	]	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan (%)	100	100	TOMONI
]	]	]	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	TOMONI TIMUR
]	]	]	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan	100	100	TOMONI TIMUR

		Daerah (%)				
]	]	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan (%)	100	100	TOMONI TIMUR
]	]	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (%)	100	100	TOMONI TIMUR
]	]	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang terselenggara dengan baik (%)	100	100	WASUPONDA
]	]	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitas, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah (%)	100	100	WASUPONDA
]	]	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan (%)	100	100	WASUPONDA
]	]	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (%)	100	100	WASUPONDA
]	]	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase penyelenggaraan pemerintahan yang terselenggara dengan baik (%)	100	100	WOTU
]	]	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitas, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah (%)	100	100	WOTU
]	]	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Umum kecamatan (%)	100	100	WOTU
]	]	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (%)	100	100	WOTU
]	]	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase capaian kinerja peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (%)	100	100	TOWUTI

1	1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Peran serta Masyarakat dalam Koordinasi, Fasilitasi, Konsultasi dan Supervisi Pembangunan Daerah (%)	100	100	TOWUTI
1	1	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Capaian Kinerja Penyelenggaran Pemerintahan Umum kecamatan (%)	100	100	TOWUTI
1	1	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase penyelenggaraan pemerintahan desa yang berjalan sesuai standar dan ketentuan perundangan yang berlaku (%)	100	100	TOWUTI
3	1	Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat (M5)				
3	6	Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap norma ketertiban dan ketenteraman (T6)	Angka kriminalitas (Persen)	0	0	
3	6	9) Terpeliharanya rasa aman dan damai dalam masyarakat (S9)	Nilai Kepuasan Masyarakat atas Kondisi Keamanan dan Ketertiban (Persen)	0	0	
1	1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan dasar penanggulangan bencana (%)	33.54	33.57	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1	1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Jumlah Pelanggaran Perda/Perkada tahun berjalan (kasus)	50	45	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	1	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Jumlah kegiatan yang terlaksana pada Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran (Kegiatan)	120	120	DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1	1	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus ketentraman dan ketertiban yang di mediasi (%)	0	100	ANGKONA
1	1	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus ketentraman dan ketertiban yang di mediasi (%)	100	100	BURAU
1	1	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus ketentraman dan ketertiban yang di mediasi (%)	100	100	MALILI
1	1	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus ketentraman dan ketertiban yang di mediasi (%)	0	100	MANGKUTANA
1	1	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus ketentraman dan ketertiban yang di mediasi (%)	100	100	NUHA

7	7	7	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus ketentraman dan ketertiban yang di mediasi (%)	100	100	TOMONI TIMUR
7	7	7	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus ketentraman dan ketertiban yang di mediasi (%)	100	100	WASUPONDA
7	7	7	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus ketentraman dan ketertiban yang di mediasi (%)	100	100	WOTU
7	7	7	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Kasus ketentraman dan ketertiban yang di mediasi (%)	0	100	TOWUTI
7	7	7	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase jumlah kebijakan penguatan ideology pancasila dan karakter kebangsaan yang dilaksanakan (%)	95	95	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7	7	7	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase capaian pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik dan peningkatan demokrasi dan fasilitasi kelembagaan pemerintahan serta pemantauan situasi politik (%)	95	95	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7	7	7	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase jumlah ormas yang diberdayakan dan diawasi (%)	95	95	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7	7	7	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase capaian peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatankualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial (%)	95	95	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6	7	7	Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya (M6)				
6	7	7	Mengembangkan, mempertahankan dan menerapkan nilai-nilai agama dan budaya (T7)	Cakupan penerapan nilai agama dan budaya dalam pemerintahan dan kehidupan sehari-hari (Persen)	0	0	
6	7	10	Meningkatnya penerapan nilai-nilai agama dan budaya sebagai landasan pembangunan (S10)	Indeks kerukunan umat beragama (Persen)		75,50	
				Indeks pembangunan kebudayaan (Persen)	0	0	
7	7	7	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Seni dan Kebudayaan Daerah yang di Lestarikan (Persen)	80	85	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Seni dan Kebudayaan Daerah yang di Lestarikan (Persen)	100	100	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Presentase benda, Situs dan Cagar Budaya yang dilestarikan (Persen)	45.33	43.75	DINAS PARIWISATA, KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Sumber : RKPD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022.